

Ekonomi Rakyat dalam Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

Artikel Akademik

2026



ARTIKEL AKADEMIK



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycct.com/cv.pdf

IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

Ekonomi Rakyat dalam Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional

Menguatkan UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan ekonomi lokal sebagai fondasi pemulihan ekonomi Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan.



1. UMKM & Wirausaha Lokal



2. Koperasi Produktif



3. Pertanian & Pangan



4. Nelayan & Ekonomi Maritim



5. Lapangan Kerja & Pendapatan



6. Perlindungan Sosial & Daya Beli



“

“Ekonomi rakyat yang kuat adalah jalan menuju pemulihan yang adil, tangguh, dan menyejahterakan.”

”



Inklusif



Berkeadilan



Produktif



Berkelanjutan

Abstrak

Pemulihan ekonomi nasional yang kokoh tidak cukup diukur dari kembalinya laju pertumbuhan produk domestik bruto, membaiknya indikator pasar keuangan, atau meningkatnya investasi berskala besar. Pemulihan yang bermakna harus terlihat pada pulihnya kapasitas ekonomi rumah tangga, meningkatnya kesempatan kerja yang layak, tumbuhnya usaha mikro dan kecil, menguatnya daya beli, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap modal, teknologi, pasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam konteks tersebut, ekonomi rakyat bukan sektor residual yang sekadar perlu dilindungi, melainkan fondasi produksi, konsumsi, kewirausahaan, dan ketahanan sosial yang menentukan mutu pemulihan ekonomi Indonesia. Artikel ini membahas posisi ekonomi rakyat dalam strategi pemulihan ekonomi nasional dengan menelaah hubungan antara pertumbuhan, pemerataan, produktivitas, formalitas usaha, ekonomi lokal, digitalisasi, koperasi, UMKM, pertanian rakyat, kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan tata kelola pembangunan. Argumen utama artikel adalah bahwa pemulihan ekonomi harus bergerak dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada agregat makro menuju pendekatan *people-centered recovery*, yaitu pemulihan yang menempatkan peningkatan kapabilitas masyarakat sebagai tujuan sekaligus mesin pertumbuhan. Dengan memadukan kerangka ekonomi kelembagaan, pembangunan inklusif, ekonomi kerakyatan, dan kebijakan publik, artikel menawarkan kerangka strategis untuk menjadikan ekonomi rakyat lebih produktif, tangguh, terhubung dengan rantai nilai, dan mampu menjadi sumber pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi rakyat; pemulihan ekonomi nasional; UMKM; koperasi; pekerjaan layak; ekonomi lokal; perlindungan sosial; produktivitas; inklusi keuangan; transformasi digital.

1. Pendahuluan: Pemulihan Ekonomi Harus Berakar pada Kehidupan Rakyat

Setiap krisis ekonomi meninggalkan dua jenis kerusakan. Kerusakan pertama mudah terlihat dalam statistik makro: pertumbuhan turun, investasi tertahan, produksi melemah, perdagangan terganggu, dan ruang fiskal menyempit. Kerusakan kedua lebih tersebar dan sering kurang terlihat: tabungan rumah tangga menipis, modal kerja pedagang kecil tergerus, petani menunda pembelian sarana produksi, pekerja informal kehilangan jam kerja, usaha keluarga menjual aset, dan anak muda menunda masuk ke pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Karena itu, pemulihan ekonomi tidak cukup dimaknai sebagai ketika kurva produk domestik bruto kembali meningkat. Pemulihan harus dilihat dari kemampuan masyarakat untuk kembali bekerja, berusaha, berproduksi, mengonsumsi secara layak, mengakses layanan dasar, serta membangun kembali harapan ekonomi untuk masa depan.

Indonesia memasuki periode pascakrisis dengan fundamental pertumbuhan yang relatif terjaga, tetapi tantangan kualitas pertumbuhan tetap besar. BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada tahun 2025, sedangkan pada triwulan I-2026 pertumbuhan mencapai 5,61 persen secara tahunan. Pada saat yang sama, persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen dan tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 berada pada 4,74 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan perbaikan agregat, tetapi pemulihan tetap perlu dinilai melalui pertanyaan yang lebih substantif: siapa yang memperoleh pekerjaan baru, berapa besar peningkatan pendapatannya, apakah usaha mikro bertambah produktif, apakah rumah tangga rentan menjadi lebih aman dari guncangan, dan apakah kesenjangan antarwilayah serta antara ekonomi formal dan informal semakin menyempit.

Di titik inilah ekonomi rakyat memperoleh relevansi strategis. Ekonomi rakyat mencakup aktivitas ekonomi yang hidup dekat dengan masyarakat: usaha mikro dan kecil, koperasi, perdagangan lokal, pertanian keluarga, perikanan skala kecil, industri rumah tangga, jasa personal, ekonomi kreatif, usaha perempuan, wirausaha muda, pekerjaan mandiri, serta berbagai bentuk produksi komunitas. Ia tidak identik dengan usaha berteknologi rendah atau usaha yang harus selamanya kecil. Ekonomi rakyat adalah ruang ekonomi tempat sebagian besar masyarakat mengubah tenaga kerja, pengetahuan lokal, jaringan sosial, dan aset terbatas menjadi pendapatan dan kesejahteraan. Dengan kebijakan yang tepat, pelaku ekonomi rakyat dapat naik kelas, mengadopsi teknologi, memasuki pasar formal, meningkatkan kualitas produk, dan menjadi bagian dari rantai pasok modern.

Strategi pemulihan ekonomi nasional karena itu perlu membalik urutan berpikir yang selama ini kerap digunakan. Ekonomi rakyat bukan penerima limpahan pertumbuhan setelah sektor-sektor besar pulih. Ekonomi rakyat justru harus diposisikan sebagai salah satu sumber permintaan domestik, penciptaan kerja, inovasi berbasis kebutuhan, ketahanan pangan, dan sirkulasi pendapatan di daerah. Pemulihan yang berakar pada ekonomi rakyat menciptakan efek pengganda yang luas karena peningkatan pendapatan kelompok berpendapatan rendah dan menengah cenderung cepat kembali ke pasar lokal melalui konsumsi barang dan jasa. Di sinilah pemulihan menjadi proses ekonomi sekaligus sosial.

2. Memahami Ekonomi Rakyat: Bukan Sekadar Ekonomi Kecil

Istilah ekonomi rakyat sering disederhanakan sebagai ekonomi berskala kecil, informal, tradisional, atau subsisten. Penyederhanaan tersebut menimbulkan risiko kebijakan karena membuat intervensi pemerintah berhenti pada bantuan sosial, subsidi, atau kredit murah tanpa agenda peningkatan produktivitas dan daya saing. Secara konseptual, ekonomi rakyat lebih tepat dipahami sebagai sistem kegiatan ekonomi yang kepemilikan, pengambilan keputusan, manfaat, dan risikonya berada dekat dengan rumah tangga dan komunitas. Karakter ini membedakannya dari kegiatan ekonomi yang sangat terkonsentrasi pada modal besar, walaupun keduanya tidak harus dipertentangkan.

Ekonomi rakyat mempunyai dimensi kepemilikan, kesempatan, dan distribusi. Dimensi kepemilikan berkaitan dengan siapa yang menguasai alat produksi dan aset produktif. Dimensi kesempatan menyangkut kemampuan masyarakat memperoleh akses terhadap pasar, modal, tanah, teknologi, informasi, dan jaringan usaha. Dimensi distribusi menyangkut bagaimana hasil pertumbuhan tersebar melalui upah, laba usaha, harga yang adil, dan layanan publik. Dengan demikian, ekonomi rakyat tidak cukup dinilai dari jumlah unit usaha. Yang lebih penting adalah apakah unit-unit tersebut memiliki kemampuan untuk bertahan, bertumbuh, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan pemilik maupun pekerjanya.

Dalam tradisi pembangunan Indonesia, ekonomi rakyat berkaitan erat dengan gagasan demokrasi ekonomi. Kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya efisien dalam menghasilkan output, tetapi juga membuka partisipasi seluas mungkin. Artinya, produktivitas dan keadilan bukan tujuan yang saling meniadakan. Produktivitas diperlukan agar pendapatan meningkat, sementara keadilan diperlukan agar manfaat produktivitas tidak terkonsentrasi. Jika produktivitas rendah, redistribusi memiliki sumber yang terbatas. Sebaliknya, bila produktivitas meningkat tetapi manfaatnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil pelaku, pertumbuhan tidak otomatis memperkuat kohesi sosial dan kesejahteraan.

Ekonomi rakyat juga perlu dilihat sebagai ekosistem. Pedagang pasar bergantung pada pemasok, transportasi, kredit, energi, dan konsumen. Petani bergantung pada input, irigasi, penyuluhan, cuaca, gudang, logistik, harga, dan pembeli. UMKM digital bergantung pada internet, platform, pembayaran, keamanan siber, dan literasi keuangan. Karena itu, kebijakan yang hanya menyentuh satu titik sering tidak memadai. Memberi kredit kepada usaha tanpa membuka pasar dapat menambah utang tetapi tidak menambah penjualan. Mendorong digitalisasi tanpa meningkatkan kemampuan produksi dapat meningkatkan eksposur tetapi tidak meningkatkan margin. Pendekatan ekosistem menghubungkan pembiayaan, kapasitas, standardisasi, teknologi, dan akses pasar dalam satu strategi yang konsisten.

3. Dari Pemulihan Makro menuju Pemulihan yang Berpusat pada Manusia

Pemulihan makro penting karena stabilitas inflasi, nilai tukar, fiskal, dan sistem keuangan merupakan prasyarat bagi kegiatan usaha. Namun, indikator makro adalah sarana, bukan tujuan akhir. Sebuah negara dapat mencatat pertumbuhan yang memadai tetapi tetap menghadapi upah stagnan, pekerjaan informal yang luas, produktivitas rendah, dan kesenjangan wilayah. Karena itu, gagasan people-centered recovery menempatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat sebagai

pusat evaluasi kebijakan. Pertumbuhan dinilai baik apabila menciptakan kapasitas produktif, memperluas pekerjaan layak, dan meningkatkan daya tahan rumah tangga terhadap guncangan.

Kerangka kapabilitas Amartya Sen membantu menjelaskan mengapa pendapatan saja tidak cukup. Kesejahteraan terkait dengan kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai: sehat, berpendidikan, aman, produktif, dan mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam strategi pemulihan, hal ini berarti belanja kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, dan perlindungan sosial tidak boleh dianggap sekadar biaya sosial. Belanja tersebut merupakan investasi yang memungkinkan masyarakat bekerja lebih produktif, mengambil risiko usaha secara rasional, dan mengembangkan keterampilan baru.

Pendekatan berpusat pada manusia juga mengubah cara melihat perlindungan sosial. Perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman ketika terjadi krisis. Sistem yang adaptif dapat menjadi jembatan menuju produktivitas. Bantuan tunai menjaga konsumsi minimum, asuransi sosial mencegah rumah tangga jatuh miskin akibat sakit atau kehilangan pekerjaan, program pelatihan membantu transisi kerja, dan subsidi terarah dapat mencegah penutupan usaha yang sebenarnya masih layak. Dengan demikian, perlindungan sosial dan kebijakan produktivitas seharusnya dirancang sebagai satu rangkaian, bukan dua dunia kebijakan yang terpisah.

Pemulihan yang berpusat pada manusia juga menuntut perbaikan indikator kinerja pemerintah. Jika keberhasilan hanya diukur dari penyerapan anggaran atau jumlah penerima program, pemerintah akan terdorong mengejar output administratif. Ukuran yang lebih relevan adalah outcome: pertumbuhan pendapatan, produktivitas pekerja, kelangsungan usaha setelah bantuan berakhir, kenaikan formalitas, peningkatan akses pasar, penurunan kerentanan, dan peningkatan mobilitas ekonomi. Dengan indikator seperti itu, program ekonomi rakyat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan, bukan program tambahan di pinggir kebijakan makro.

4. UMKM sebagai Infrastruktur Sosial-Ekonomi Pemulihan

Usaha mikro, kecil, dan menengah sering disebut tulang punggung perekonomian Indonesia karena jumlahnya sangat besar dan perannya dalam penyerapan tenaga kerja luas. Namun, arti strategis UMKM bukan hanya karena kuantitas. UMKM merupakan infrastruktur sosial-ekonomi yang menyebarkan aktivitas produksi hingga ke kota kecil, desa, kawasan pinggiran, dan kelompok masyarakat yang sering tidak terjangkau perusahaan besar. Melalui UMKM, uang berputar di komunitas, keterampilan keluarga menjadi sumber pendapatan, dan wirausaha baru dapat lahir dengan kebutuhan modal yang relatif lebih rendah.

Kelemahan utama banyak UMKM adalah produktivitas yang rendah. Produktivitas rendah muncul dari kombinasi skala usaha, teknologi sederhana, kualitas manajemen, keterbatasan pembiayaan, lemahnya pembukuan, kurangnya standardisasi, dan pasar yang sempit. Karena itu, strategi pemulihan tidak boleh berhenti pada slogan menaikkan jumlah UMKM. Indonesia justru membutuhkan lebih banyak UMKM yang sehat, formal, produktif, inovatif, dan terhubung ke rantai pasok. Ukuran keberhasilan harus mencakup peningkatan omzet per pekerja, margin usaha, stabilitas arus kas, kualitas produk, dan kemampuan menembus pasar baru.

Pendekatan klaster dapat menjadi instrumen penting. Alih-alih menangani ribuan usaha secara individual, pemerintah daerah dapat membangun klaster pangan olahan, furnitur, kerajinan, pariwisata, fesyen, hortikultura, atau ekonomi kreatif berdasarkan keunggulan setempat. Dalam klaster, layanan bersama seperti desain kemasan, laboratorium mutu, gudang, logistik, pelatihan digital, konsultasi hukum, dan promosi dapat disediakan dengan biaya yang lebih efisien. Koperasi atau badan layanan bersama dapat mengelola fungsi-fungsi yang sulit dikerjakan oleh satu usaha mikro sendiri.

Contoh hipotetis dapat menggambarkan logika ini. Seratus produsen kopi di sebuah kabupaten mungkin masing-masing terlalu kecil untuk membeli mesin sortasi, membangun laboratorium, atau mengakses eksportir. Jika mereka membentuk kelembagaan bersama, memperoleh pendampingan mutu, menggunakan merek kawasan, dan menegosiasikan kontrak secara kolektif, skala ekonomi dapat terbentuk tanpa menghilangkan kepemilikan individual. Pemulihan ekonomi menjadi proses penguatan struktur produksi, bukan sekadar pemulihan penjualan sesaat.

Di era digital, UMKM juga harus bergerak dari digital presence menuju digital capability. Memiliki akun media sosial atau masuk marketplace belum tentu menghasilkan produktivitas. Kapabilitas digital meliputi kemampuan menggunakan data penjualan, mengelola inventori, menerima pembayaran digital, melakukan pembukuan, menjaga keamanan transaksi, dan membangun hubungan pelanggan. Digitalisasi yang produktif mengurangi biaya transaksi, meningkatkan ketepatan keputusan, dan membuka pasar. Namun, digitalisasi harus disertai peningkatan kualitas produk dan manajemen agar tidak menimbulkan kompetisi harga yang makin menekan margin usaha kecil.

5. Koperasi sebagai Mesin Skala Ekonomi dan Daya Tawar

Koperasi mempunyai posisi khas dalam ekonomi rakyat karena menggabungkan tujuan ekonomi dengan kepemilikan bersama. Tantangan ekonomi rakyat sering bukan ketiadaan aktivitas, melainkan fragmentasi. Produsen kecil membeli input secara eceran, menjual dalam jumlah kecil, tidak memiliki gudang, dan memiliki daya tawar rendah terhadap pembeli besar. Koperasi dapat mengonsolidasikan permintaan dan penawaran sehingga anggota memperoleh harga input lebih baik, akses pasar lebih stabil, dan biaya logistik lebih rendah.

Namun, romantisasi koperasi perlu dihindari. Koperasi yang lemah tata kelola dapat berubah menjadi organisasi administratif yang tidak menciptakan nilai. Karena itu, revitalisasi koperasi harus menekankan profesionalisme manajemen, transparansi, audit, partisipasi anggota, penggunaan teknologi, dan orientasi pada pelayanan ekonomi yang konkret. Koperasi modern harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: biaya apa yang dapat diturunkan bagi anggota, harga apa yang dapat diperbaiki, risiko apa yang dapat dibagi, dan pasar apa yang dapat dibuka.

Dalam strategi pemulihan, koperasi dapat berperan sebagai aggregator. Di sektor pertanian, koperasi dapat mengonsolidasikan hasil, menerapkan standardisasi, mengelola cold storage, dan menegosiasikan kontrak. Di sektor pekerja mandiri, koperasi dapat menyediakan alat bersama, asuransi, dan layanan administrasi. Di sektor digital, koperasi dapat menjadi sarana kepemilikan platform atau pengelolaan data bersama. Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan bahwa koperasi

bukan kebalikan dari modernisasi; koperasi justru dapat menjadi bentuk kelembagaan yang memungkinkan pelaku kecil memasuki ekonomi modern dengan daya tawar lebih kuat.

Koperasi juga relevan untuk generasi muda jika tidak dibingkai sebagai lembaga lama dengan prosedur birokratis. Platform cooperative, koperasi pekerja kreatif, koperasi produsen digital, dan koperasi energi komunitas menunjukkan bahwa prinsip kepemilikan bersama dapat diterapkan dalam ekonomi baru. Dalam pemulihan nasional, inovasi kelembagaan semacam ini penting agar keuntungan digitalisasi tidak seluruhnya mengalir ke pemilik modal dan platform, tetapi sebagian dapat kembali kepada produsen, pekerja, dan komunitas.

6. Pertanian Rakyat, Pangan, dan Ketahanan Ekonomi

Ekonomi rakyat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan rakyat, dan rantai pangan lokal. Ketahanan pangan sering dipandang sebagai isu produksi nasional, padahal dari sudut ekonomi rakyat ia juga merupakan isu pendapatan produsen dan daya beli konsumen. Harga pangan yang terlalu rendah merugikan petani; harga yang terlalu tinggi menekan rumah tangga miskin. Kebijakan pangan harus menjaga keseimbangan antara insentif produksi, efisiensi distribusi, stabilitas harga, dan akses masyarakat.

Pemulihan ekonomi melalui pertanian rakyat memerlukan pergeseran dari peningkatan produksi semata menuju peningkatan nilai tambah. Petani yang hanya menjual bahan mentah cenderung menerima bagian kecil dari nilai akhir. Pengolahan, grading, packaging, penyimpanan, sertifikasi, dan pemasaran dapat meningkatkan bagian nilai yang diterima produsen. Infrastruktur seperti irigasi, jalan usaha tani, listrik, internet, gudang, pasar lelang, dan rantai dingin bukan hanya proyek fisik; infrastruktur tersebut adalah prasyarat produktivitas ekonomi rakyat.

Kebijakan juga perlu memperkuat manajemen risiko. Perubahan iklim, banjir, kekeringan, hama, fluktuasi harga, dan gangguan logistik membuat pendapatan pertanian sangat volatil. Asuransi pertanian, informasi cuaca, diversifikasi komoditas, kontrak pembelian, dan akses pembiayaan musiman dapat mengurangi risiko. Ketika risiko menurun, petani lebih berani mengadopsi teknologi dan meningkatkan investasi. Dengan demikian, ketahanan dan produktivitas saling memperkuat.

Keterhubungan desa-kota juga penting. Pemulihan ekonomi tidak harus memindahkan semua tenaga kerja dari desa ke kota. Yang dibutuhkan adalah meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi di desa dan memperkuat hubungan pasar dengan kota. Agroindustri skala menengah, pusat logistik, pariwisata berbasis komunitas, energi terbarukan, dan jasa digital dapat memperluas basis ekonomi perdesaan. Desa kemudian tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja, tetapi ruang penciptaan nilai tambah.

7. Pekerjaan Layak, Upah, dan Produktivitas

Ekonomi rakyat sering bersinggungan dengan informalitas. Pekerjaan informal menyediakan pintu masuk bagi jutaan orang, tetapi sering diikuti pendapatan tidak stabil, perlindungan sosial terbatas, keselamatan kerja rendah, dan akses kredit yang lemah. ILO menekankan bahwa informalitas berhubungan dengan kerentanan dan kualitas kondisi kerja. Tantangan kebijakan bukan

menghapus informalitas secara administratif, melainkan menciptakan jalur transisi yang membuat formalitas memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan usaha.

Formalisasi akan sulit jika hanya menambah kewajiban. Pelaku usaha akan bersedia masuk ke sistem formal apabila memperoleh manfaat: akses pembiayaan, pengadaan pemerintah, pelatihan, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan peluang pasar. Karena itu, registrasi usaha, nomor induk berusaha, perpajakan sederhana, dan jaminan sosial harus diintegrasikan dalam pengalaman layanan yang mudah. Prinsipnya adalah *exchange of value*: negara memperoleh kepatuhan dan data yang lebih baik, sementara pelaku memperoleh keamanan dan peluang yang lebih besar.

Hubungan antara upah dan produktivitas juga penting. Upah yang terlalu rendah melemahkan daya beli dan insentif peningkatan keterampilan, sedangkan kenaikan upah yang jauh melampaui produktivitas dapat menekan kelangsungan usaha. Solusi jangka panjang bukan menahan upah, melainkan menaikkan produktivitas. Pelatihan vokasi, teknologi tepat guna, manajemen proses, standardisasi, dan akses pasar harus memungkinkan pekerja menghasilkan nilai lebih besar sehingga ruang bagi peningkatan upah juga membesar.

BPS mencatat rata-rata upah buruh pada November 2025 sekitar Rp3,33 juta. Angka rata-rata nasional menyembunyikan variasi besar menurut wilayah, sektor, pendidikan, gender, dan status kerja. Karena itu, kebijakan pemulihan harus mempertimbangkan distribusi. Penciptaan pekerjaan di sektor berproduktivitas rendah memang dapat menurunkan pengangguran, tetapi belum tentu meningkatkan kesejahteraan secara berarti. Strategi nasional perlu mengejar *more and better jobs*: lebih banyak pekerjaan sekaligus pekerjaan yang lebih produktif, aman, dan memberikan peluang berkembang.

8. Pembiayaan Rakyat: Dari Akses Kredit menuju Kesehatan Finansial

Akses pembiayaan sering disebut sebagai hambatan utama ekonomi rakyat. Pernyataan ini benar tetapi belum lengkap. Persoalannya bukan hanya apakah kredit tersedia, melainkan apakah kredit sesuai dengan siklus usaha, biaya terjangkau, disertai kemampuan pengelolaan, dan digunakan untuk kegiatan produktif. Kredit yang salah desain dapat meningkatkan kerentanan. Karena itu, inklusi keuangan harus berkembang menjadi kesehatan finansial: kemampuan mengelola arus kas, menabung, berinvestasi, mengasuransikan risiko, dan menggunakan utang secara produktif.

Skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat penting karena dapat memperluas akses, tetapi kredit perlu terhubung dengan pendampingan dan pasar. Pendekatan *value-chain finance* dapat menjadi alternatif. Lembaga keuangan menilai kelayakan usaha tidak hanya dari agunan, tetapi dari kontrak, data transaksi, hubungan pemasok, dan pola penjualan. Pembayaran digital dan pembukuan elektronik dapat membantu membangun jejak usaha sehingga pelaku yang sebelumnya tidak bankable menjadi lebih terbaca oleh sistem keuangan.

Fintech membuka peluang tetapi juga menambah risiko baru. Pinjaman digital yang cepat dapat membantu modal kerja, namun biaya tinggi, perilaku penagihan, dan literasi rendah dapat menimbulkan masalah. Karena itu, digital finance harus dibangun di atas perlindungan konsumen,

transparansi harga, keamanan data, dan mekanisme pengaduan. Inklusi yang sehat bukan memperbanyak utang, melainkan memperluas pilihan finansial dengan risiko yang terkendali.

Pembiayaan ekuitas atau quasi-equity juga perlu dikembangkan untuk usaha kecil yang potensial tumbuh. Sebagian usaha memerlukan modal sabar, bukan cicilan bulanan. Kemitraan dengan BUMN, perusahaan swasta, impact investors, koperasi, dan dana daerah dapat menciptakan model pembiayaan berbagi risiko. Dengan beragam instrumen, ekonomi rakyat tidak terjebak pada satu-satunya jalan berupa kredit bank.

9. Digitalisasi, AI, dan Transformasi Produktivitas Ekonomi Rakyat

Transformasi digital membuka peluang besar bagi ekonomi rakyat. Teknologi dapat menurunkan biaya transaksi, memperluas pasar, memperbaiki pencatatan, mempercepat pembayaran, dan memungkinkan layanan pemerintah diberikan lebih tepat sasaran. Namun, manfaat digitalisasi tidak otomatis merata. Pelaku dengan perangkat, konektivitas, keterampilan, dan modal lebih baik akan lebih cepat menikmati manfaat. Tanpa intervensi, kesenjangan digital dapat berubah menjadi kesenjangan produktivitas.

Karena itu, kebijakan digital untuk ekonomi rakyat harus berlapis. Lapisan pertama adalah konektivitas dan perangkat. Lapisan kedua adalah literasi digital dan keuangan. Lapisan ketiga adalah kemampuan bisnis: pemasaran, pembukuan, manajemen inventori, analitik sederhana, dan keamanan. Lapisan keempat adalah integrasi ke ekosistem: pembayaran, logistik, perizinan, pajak, pengadaan, dan pasar. Pendampingan sebaiknya berbasis kebutuhan sektor dan tingkat kematangan usaha, bukan pelatihan umum yang sama untuk semua.

Artificial intelligence mulai memberi peluang baru. Pelaku UMKM dapat menggunakan AI untuk membuat konten pemasaran, menerjemahkan katalog, menganalisis komentar pelanggan, menyusun rancangan produk, merencanakan stok, dan memperbaiki layanan. Tetapi AI bukan pengganti keterampilan bisnis dasar. Jika data buruk dan proses bisnis tidak tertata, teknologi hanya mempercepat ketidakteraturan. Pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan teknologi dapat membangun pusat layanan AI bersama yang menyediakan alat sederhana, pelatihan, dan standar etika bagi UMKM.

Ada pula isu ketergantungan platform. Ketika pelaku usaha terlalu bergantung pada satu marketplace, perubahan algoritma, biaya komisi, atau aturan dapat memengaruhi kelangsungan usahanya. Strategi digital yang sehat perlu mendorong multichannel capability: memanfaatkan platform tetapi tetap membangun merek, basis pelanggan, pencatatan sendiri, dan hubungan langsung. Data transaksi harus dipandang sebagai aset yang perlu dikelola dengan aman.

10. Kebijakan Fiskal dan APBN sebagai Pengungkit Ekonomi Rakyat

Pemulihan ekonomi membutuhkan kebijakan fiskal yang mampu menggabungkan fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Ketika permintaan melemah, belanja pemerintah dapat menahan kontraksi. Ketika ketimpangan meningkat, transfer dan layanan publik dapat melindungi rumah tangga. Ketika produktivitas tertahan, investasi publik dapat memperbaiki infrastruktur dan sumber

daya manusia. Bagi ekonomi rakyat, kualitas komposisi belanja sama pentingnya dengan besar anggaran.

APBN 2026 menempatkan beberapa agenda yang langsung berkaitan dengan ekonomi rakyat, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi, UMKM, dan perlindungan sosial. Anggaran perlindungan sosial yang besar menunjukkan pengakuan bahwa daya tahan rumah tangga merupakan bagian dari stabilitas ekonomi. Tantangannya adalah memastikan integrasi antarprogram, ketepatan sasaran, dan jalur graduasi dari bantuan menuju kemandirian produktif.

Pengadaan pemerintah dapat menjadi instrumen yang sangat kuat. Pemerintah membeli barang dan jasa dalam skala besar. Jika sebagian permintaan tersebut secara transparan diarahkan untuk produk UMKM yang memenuhi standar, negara bukan hanya memberi bantuan tetapi menciptakan pasar. Kebijakan ini perlu didukung katalog digital, pembayaran tepat waktu, standardisasi, dan pendampingan agar usaha kecil mampu memenuhi kualitas serta volume.

Insentif pajak juga sebaiknya dirancang untuk mendorong formalitas dan investasi produktif. Kesederhanaan administrasi lebih penting bagi usaha mikro dibanding struktur insentif yang rumit. Tarif yang ringan, pelaporan mudah, dan kepastian aturan dapat mengurangi biaya kepatuhan. Namun, kebijakan pajak harus dihubungkan dengan layanan yang diterima pelaku. Formalitas akan lebih menarik bila membuka akses pembiayaan, pengadaan, perlindungan, dan pasar.

Di sisi daerah, transfer fiskal dapat dikaitkan dengan outcome ekonomi rakyat. Daerah yang berhasil meningkatkan formalitas usaha, produktivitas klaster, pekerjaan layak, dan kualitas layanan bisa memperoleh insentif. Ini mengubah orientasi dari pembangunan proyek menjadi pembangunan kapasitas ekonomi lokal. Kebijakan fiskal pada akhirnya harus membantu masyarakat membangun aset, bukan hanya mempertahankan konsumsi.

11. Perlindungan Sosial Adaptif sebagai Fondasi Keberanian Berusaha

Salah satu kesalahpahaman dalam diskursus ekonomi adalah menganggap perlindungan sosial berlawanan dengan kemandirian. Dalam kenyataan, rumah tangga tanpa perlindungan sering mengambil keputusan yang sangat defensif: menghindari investasi, menjual aset saat krisis, menarik anak dari sekolah, atau memilih pekerjaan berpendapatan rendah tetapi dianggap aman. Perlindungan sosial yang kredibel dapat menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengambil risiko produktif.

Pengalaman pandemi menunjukkan pentingnya data sosial-ekonomi yang akurat dan kemampuan program untuk diperluas dengan cepat. Studi Prasetyo, Surtiari, dan Nawawi (2023) menekankan hubungan antara pembatasan sosial, perlindungan sosial, dan respons risiko di Indonesia. Pelajaran utamanya adalah sistem perlindungan harus adaptif terhadap jenis krisis yang berbeda: pandemi, bencana, kehilangan pekerjaan, kenaikan harga pangan, atau guncangan iklim. Data terpadu, interoperabilitas, dan mekanisme pembayaran yang efisien menjadi infrastruktur kebijakan.

Bagi pelaku ekonomi rakyat, perlindungan sosial mencakup lebih dari bantuan tunai. Jaminan kesehatan mengurangi risiko biaya medis; jaminan kecelakaan melindungi pekerja; jaminan kehilangan pekerjaan membantu transisi; penitipan anak meningkatkan partisipasi kerja perempuan; bantuan pangan menjaga konsumsi; dan program pelatihan membuka peluang mobilitas. Integrasi ini membuat perlindungan sosial menjadi enabling system.

Program juga perlu memiliki mekanisme graduasi yang cerdas. Graduasi bukan sekadar mengeluarkan rumah tangga dari daftar penerima setelah pendapatan naik sedikit. Jika dukungan dihentikan terlalu cepat, rumah tangga dapat kembali rentan. Pendekatan bertahap dapat mengurangi bantuan konsumtif sambil meningkatkan akses pada pelatihan, modal usaha, layanan penempatan kerja, dan asuransi. Dengan demikian, perubahan status terjadi karena kapasitas ekonomi meningkat, bukan karena batas administratif terlampaui.

12. Ekonomi Lokal, Desentralisasi, dan Strategi Berbasis Tempat

Indonesia sangat beragam. Struktur ekonomi Jakarta, Papua, Minahasa, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Maluku berbeda dalam sumber daya, pasar, kepadatan penduduk, infrastruktur, dan budaya usaha. Karena itu, strategi ekonomi rakyat tidak dapat sepenuhnya seragam. Pendekatan place-based development menekankan pentingnya membangun kebijakan berdasarkan potensi, hambatan, dan jaringan ekonomi setempat.

Pemerintah daerah perlu memetakan rantai nilai lokal secara lebih tajam. Pemetaan tidak hanya mencatat komoditas unggulan, tetapi siapa aktor utama, di mana margin terbesar terbentuk, biaya logistik apa yang paling berat, keterampilan apa yang kurang, dan teknologi apa yang dapat meningkatkan produktivitas. Dari pemetaan tersebut, intervensi dapat diprioritaskan. Satu daerah mungkin membutuhkan cold chain; daerah lain membutuhkan sertifikasi; daerah lain memerlukan desain produk atau konektivitas digital.

Universitas dan politeknik daerah dapat berperan sebagai knowledge partner. Laboratorium, dosen, mahasiswa, dan pusat inovasi dapat membantu pengujian mutu, desain proses, digitalisasi, pemasaran, serta evaluasi kebijakan. Kolaborasi kampus-industri-pemerintah-komunitas dapat menjadikan pemulihan sebagai proses pembelajaran kolektif. Bagi perguruan tinggi, ekonomi rakyat juga menjadi laboratorium nyata untuk pendidikan manajemen, kewirausahaan, teknologi, dan kebijakan publik.

Desentralisasi perlu diimbangi kapasitas tata kelola. Banyak program gagal bukan karena gagasannya salah, tetapi karena koordinasi, data, pengadaan, pengawasan, dan pendampingan lemah. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah harus menjadi bagian dari strategi nasional. Pemulihan ekonomi rakyat memerlukan birokrasi yang mampu berfungsi sebagai fasilitator ekosistem, bukan hanya administrator bantuan.

13. Perempuan, Pemuda, dan Kelompok Rentan dalam Ekonomi Rakyat

Pemulihan yang inklusif harus memperhatikan siapa yang tertinggal. Perempuan banyak terlibat dalam usaha mikro, perdagangan, pangan, kerajinan, jasa, dan pekerjaan perawatan, tetapi sering

menghadapi keterbatasan aset, waktu, mobilitas, dan akses pembiayaan. Program ekonomi rakyat perlu memperhitungkan *care economy*. Pelatihan yang diselenggarakan jauh dari rumah atau pada jam yang tidak fleksibel dapat mengurangi partisipasi perempuan meskipun secara formal terbuka bagi semua.

Pemuda menghadapi tantangan berbeda. Mereka relatif adaptif terhadap teknologi tetapi sering kekurangan modal, pengalaman, dan jaringan. Program wirausaha muda sebaiknya tidak hanya mendorong pembuatan startup. Banyak inovasi bernilai tinggi justru dapat terjadi ketika teknologi diterapkan pada sektor tradisional: pertanian presisi, logistik, jasa lokal, pengolahan pangan, pariwisata, atau perawatan kesehatan. Kewirausahaan perlu dilihat sebagai proses penciptaan nilai, bukan hanya pendirian perusahaan baru.

Penyandang disabilitas dan kelompok rentan membutuhkan desain layanan yang aksesibel. ILO menunjukkan bahwa tantangan pekerjaan inklusif di Indonesia masih besar dan sebagian besar pekerja penyandang disabilitas berada dalam sektor informal. Teknologi dapat membantu melalui kerja jarak jauh dan platform, tetapi hanya jika akses perangkat, pelatihan, dan perlindungan tersedia. Kebijakan harus menghindari pendekatan *charity* dan beralih pada *productive inclusion*.

Keberagaman kelompok berarti program harus menggunakan segmentasi. Usaha mikro subsisten berbeda kebutuhan dari usaha kecil ekspor; pekerja informal muda berbeda kebutuhan dari pekerja lanjut usia; perempuan kepala rumah tangga berbeda dari wirausaha profesional. Segmentasi meningkatkan efisiensi karena sumber daya publik diarahkan pada hambatan yang benar-benar dihadapi oleh kelompok sasaran.

14. Kemitraan Usaha Besar dan Ekonomi Rakyat: Dari CSR menuju Rantai Nilai

Pemulihan ekonomi rakyat tidak berarti memisahkan usaha kecil dari perusahaan besar. Justru integrasi produktif perlu diperkuat. Perusahaan besar memiliki teknologi, pasar, standar, modal, dan jaringan distribusi; usaha kecil memiliki fleksibilitas, pengetahuan lokal, dan basis produksi tersebar. Kemitraan yang sehat dapat menggabungkan keunggulan tersebut. Tantangannya adalah menghindari hubungan yang terlalu timpang.

Kebijakan kemitraan harus bergerak dari *corporate social responsibility* yang bersifat filantropis menuju *shared value* dan *supplier development*. Perusahaan dapat membantu pemasok kecil memenuhi standar, memperoleh sertifikasi, meningkatkan efisiensi, dan mengadopsi teknologi. Kontrak jangka lebih panjang memberi kepastian sehingga pelaku kecil berani berinvestasi. Skema pembayaran yang adil juga penting karena keterlambatan pembayaran dapat merusak arus kas UMKM.

BUMN memiliki potensi khusus sebagai *anchor buyer* dan pembina rantai pasok. Namun, program kemitraan perlu dievaluasi berdasarkan keberhasilan komersial mitra, bukan jumlah peserta pelatihan. Apakah pemasok lokal tetap bertahan setelah program? Apakah kualitas meningkat? Apakah omzet dari luar perusahaan pembina bertambah? Pertanyaan seperti ini mencegah ketergantungan dan mendorong kemandirian.

Persaingan yang sehat tetap diperlukan. Integrasi ke rantai nilai tidak boleh menjadikan usaha kecil captive supplier tanpa daya tawar. Transparansi kontrak, standar pembayaran, mekanisme sengketa, dan kebijakan persaingan membantu menjaga keseimbangan. Tujuan akhirnya adalah membangun jaringan produksi nasional yang efisien sekaligus tersebar manfaatnya.

15. Ekonomi Hijau, Sirkular, dan Peluang Baru bagi Ekonomi Rakyat

Pemulihan ekonomi nasional terjadi bersamaan dengan transisi menuju ekonomi rendah karbon dan tuntutan keberlanjutan. Bagi ekonomi rakyat, transisi ini dapat menjadi ancaman jika biaya kepatuhan tinggi, tetapi juga peluang besar jika kebijakan membuka akses. Pertanian regeneratif, energi surya komunitas, pengelolaan sampah, daur ulang, ekowisata, produk berkelanjutan, dan jasa perbaikan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Ekonomi sirkular sangat dekat dengan praktik ekonomi rakyat karena banyak pelaku telah lama menjalankan reparasi, penggunaan kembali, pengumpulan barang bekas, dan pengolahan material. Tantangannya adalah meningkatkan keselamatan, formalitas, teknologi, dan nilai tambah. Pekerja pemilah sampah misalnya dapat diintegrasikan dalam sistem pengelolaan kota dengan kontrak, perlindungan, dan peralatan yang lebih baik.

Transisi hijau harus adil. Jika kebijakan lingkungan hanya menambah biaya bagi petani kecil atau usaha mikro tanpa dukungan teknologi dan pembiayaan, resistensi akan muncul. Just transition berarti biaya dan manfaat perubahan dibagi secara wajar. Subsidi teknologi bersih, pelatihan, kredit hijau, dan akses pasar hijau dapat membuat pelaku kecil menjadi bagian dari solusi.

Dengan cara ini, ekonomi rakyat tidak hanya dipulihkan ke kondisi lama, tetapi diarahkan menuju struktur ekonomi yang lebih tangguh terhadap krisis iklim, energi, dan sumber daya. Pemulihan menjadi kesempatan transformasi.

16. Tata Kelola, Data, dan Evaluasi Kebijakan

Kualitas strategi sangat bergantung pada tata kelola. Ekonomi rakyat sering disentuh oleh banyak kementerian dan lembaga: koperasi, perdagangan, perindustrian, pertanian, ketenagakerjaan, sosial, keuangan, pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga keuangan. Fragmentasi dapat menghasilkan duplikasi, penerima berulang, atau program yang tidak saling terhubung. Dibutuhkan arsitektur koordinasi berbasis data dan outcome.

Data pelaku usaha perlu diperlakukan sebagai infrastruktur publik. Registrasi harus mudah dan memberikan manfaat. Data transaksi dapat membantu kebijakan, tetapi perlindungan privasi wajib dijaga. Interoperabilitas antarinstansi memungkinkan pemerintah melihat perjalanan pelaku dari bantuan ke kredit, dari pelatihan ke pasar, atau dari informal ke formal. Namun, penggunaan data harus transparan dan proporsional agar kepercayaan tidak rusak.

Evaluasi kebijakan harus membedakan input, output, outcome, dan impact. Dana yang disalurkan adalah input; jumlah pelatihan adalah output; kenaikan produktivitas adalah outcome; penurunan kemiskinan dan peningkatan mobilitas ekonomi adalah impact. Tanpa disiplin ini, program mudah terlihat berhasil karena aktivitas tinggi padahal perubahan ekonomi terbatas.

Eksperimen kebijakan terkontrol, pilot project, dan evaluasi kuasi-eksperimental dapat digunakan lebih luas. Tidak semua program harus langsung berskala nasional. Pemerintah dapat menguji beberapa model pendampingan, pembiayaan, atau digitalisasi, mengukur hasil, lalu memperluas model terbaik. Budaya kebijakan berbasis bukti akan meningkatkan efisiensi fiskal dan mengurangi program simbolik.

17. Kerangka Strategis: Tujuh Pilar Pemulihan Berbasis Ekonomi Rakyat

Dari pembahasan di atas, strategi pemulihan berbasis ekonomi rakyat dapat diringkaskan dalam tujuh pilar. Pilar pertama adalah stabilitas dan daya beli. Inflasi yang terkendali, terutama pangan dan energi, penting karena kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan porsi besar pendapatan untuk kebutuhan dasar. Stabilitas harga harus dipadukan dengan peningkatan pendapatan agar daya beli tidak hanya dipertahankan tetapi naik.

Pilar kedua adalah produktivitas dan pekerjaan layak. Program harus meningkatkan nilai tambah per pekerja melalui keterampilan, teknologi, manajemen, infrastruktur, dan akses pasar. Penciptaan kerja dan kualitas kerja harus menjadi satu agenda.

Pilar ketiga adalah pembiayaan sehat dan inklusif. Kredit, tabungan, asuransi, pembayaran digital, dan modal ekuitas perlu tersedia sesuai karakter usaha. Literasi dan perlindungan konsumen menjadi bagian integral.

Pilar keempat adalah ekosistem pasar. Pengadaan pemerintah, kemitraan usaha, e-commerce, ekspor, dan klaster harus membuka permintaan. Bantuan produksi tanpa pasar harus dihindari.

Pilar kelima adalah perlindungan sosial adaptif. Sistem perlindungan harus mencegah guncangan menghancurkan aset produktif dan mendukung transisi menuju pekerjaan serta usaha yang lebih baik.

Pilar keenam adalah transformasi hijau dan digital yang inklusif. Teknologi harus menurunkan biaya dan memperluas peluang, bukan memperbesar ketimpangan. Infrastruktur, literasi, dan regulasi dibutuhkan untuk menciptakan level playing field.

Pilar ketujuh adalah tata kelola berbasis data dan tempat. Kebijakan harus disesuaikan dengan konteks daerah, dievaluasi berdasarkan outcome, dan dikoordinasikan lintas lembaga. Ketujuh pilar tersebut saling terkait. Kegagalan satu pilar dapat melemahkan pilar lain; karena itu strategi harus bersifat integratif.

18. Agenda Implementasi 2026-2030

Pada horizon 2026-2030, langkah pertama adalah membangun baseline ekonomi rakyat yang lebih rinci. Pemerintah membutuhkan peta usaha, pekerjaan informal, produktivitas, akses digital, dan kerentanan sosial per daerah. Baseline memungkinkan target yang realistis dan mencegah program berbasis asumsi.

Langkah kedua adalah memilih klaster prioritas di setiap daerah. Klaster dipilih berdasarkan potensi nilai tambah, penyerapan kerja, keterkaitan lokal, dan prospek pasar. Pemerintah kemudian

mengarahkan infrastruktur, pelatihan, pembiayaan, standardisasi, dan promosi pada hambatan utama klaster tersebut.

Langkah ketiga adalah membangun one-stop productive inclusion service. Pelaku ekonomi rakyat seharusnya tidak perlu mendatangi banyak instansi untuk izin, pelatihan, kredit, sertifikasi, dan pengadaan. Layanan terpadu fisik-digital dapat melakukan asesmen kebutuhan dan merujuk pelaku ke intervensi yang tepat.

Langkah keempat adalah mengintegrasikan pengadaan publik dengan pengembangan pemasok. Target belanja UMKM harus diiringi peningkatan kapasitas, kualitas, dan pembayaran cepat. Pemerintah dapat menggunakan pengadaan sebagai sekolah pasar bagi pelaku kecil.

Langkah kelima adalah memperluas social insurance bagi pekerja mandiri dan informal dengan skema kontribusi fleksibel dan insentif. Perlindungan harus mengikuti pekerja, bukan hanya pekerjaan formal tertentu. Prinsip portability semakin penting di ekonomi gig dan pekerjaan multi-sumber.

Langkah keenam adalah memperkuat productive digital public infrastructure: identitas usaha, pembayaran, registrasi, katalog, interoperabilitas data, dan keamanan siber. Infrastruktur ini menurunkan biaya transaksi bagi pemerintah dan masyarakat.

Langkah ketujuh adalah membangun dashboard outcome nasional. Indikator dapat mencakup produktivitas usaha mikro, persentase formalitas, pertumbuhan upah riil, survival rate usaha, akses perlindungan sosial, proporsi pengadaan untuk UMKM, digital adoption, dan penurunan kesenjangan antarwilayah. Dashboard harus digunakan untuk manajemen, bukan sekadar publikasi.

19. Kasus Naratif: Dari Bantuan Menuju Ekosistem Produktif

Bayangkan sebuah kabupaten dengan ekonomi yang didominasi pertanian hortikultura dan usaha pangan olahan. Setelah guncangan ekonomi, pemerintah daerah membagikan bantuan modal kepada ribuan pelaku. Tahun pertama, penjualan meningkat sedikit, tetapi banyak usaha kembali stagnan karena bahan baku tidak stabil, kualitas produk berbeda, kemasan lemah, dan pasar sempit. Pendekatan bantuan terbukti tidak cukup.

Pada tahap berikutnya, pemerintah mengubah strategi. Petani, pengolah, koperasi, bank daerah, perguruan tinggi, dan jaringan ritel dipetakan dalam satu rantai nilai. Perguruan tinggi membantu standardisasi dan shelf-life. Koperasi mengelola gudang dan pembelian bersama. Bank menggunakan data kontrak penjualan untuk pembiayaan modal kerja. Dinas perdagangan memasukkan produk ke katalog pengadaan dan mempertemukan pelaku dengan ritel. Pemerintah memperbaiki jalan produksi dan internet di sentra usaha.

Dua tahun kemudian, keberhasilan tidak dinilai dari jumlah bantuan, tetapi dari kenaikan omzet, margin, tenaga kerja tetap, persentase produk bersertifikat, dan jumlah pelaku yang tidak lagi membutuhkan subsidi. Sebagian usaha tetap mikro tetapi lebih stabil; sebagian naik menjadi usaha kecil; sebagian memilih berkoperasi untuk mempertahankan skala kolektif. Tidak semua berhasil, tetapi sistem memiliki mekanisme belajar.

Kasus hipotetis ini memperlihatkan perbedaan antara program dan strategi. Program adalah satu intervensi; strategi adalah rangkaian intervensi yang mengubah struktur peluang. Pemulihan ekonomi rakyat memerlukan strategi karena hambatan yang dihadapi saling terkait. Modal tanpa pasar, pelatihan tanpa alat, digitalisasi tanpa logistik, atau perlindungan tanpa jalur produktif akan menghasilkan dampak terbatas.

20. Penutup: Menjadikan Rakyat Subjek Pemulihan

Ekonomi rakyat harus ditempatkan sebagai subjek pemulihan ekonomi nasional. Posisi ini bukan pernyataan normatif semata, melainkan pilihan ekonomi yang rasional. Indonesia memiliki pasar domestik besar, jaringan usaha kecil yang luas, sumber daya lokal beragam, dan komunitas dengan kapasitas kewirausahaan tinggi. Bila produktivitas ekonomi rakyat meningkat, efeknya tersebar melalui pendapatan, konsumsi, pekerjaan, dan aktivitas daerah.

Pemulihan yang hanya memulihkan agregat tanpa memperbaiki struktur dapat membawa ekonomi kembali pada kerentanan lama. Sebaliknya, pemulihan yang digunakan untuk membangun keterampilan, infrastruktur, formalitas, pembiayaan, perlindungan sosial, dan akses pasar akan meninggalkan kapasitas baru. Inilah makna build back better dalam konteks ekonomi rakyat: tidak sekadar kembali ke kondisi sebelum krisis, melainkan memperbaiki fondasi agar masyarakat lebih siap menghadapi guncangan berikutnya.

Peran negara bukan menggantikan inisiatif rakyat, melainkan membangun institusi yang membuat inisiatif tersebut berkembang. Peran pasar bukan ditiadakan, tetapi diarahkan agar kompetisi berlangsung adil dan peluang tidak hanya tersedia bagi pelaku besar. Peran komunitas dan koperasi adalah membangun skala kolektif. Peran perguruan tinggi adalah menyediakan pengetahuan, inovasi, dan evaluasi. Peran perusahaan besar adalah membuka rantai nilai dan transfer kapasitas.

Dengan demikian, strategi pemulihan ekonomi nasional seharusnya mempunyai ukuran keberhasilan yang sederhana tetapi mendalam: apakah semakin banyak warga memiliki pekerjaan yang layak, usaha yang produktif, pendapatan yang meningkat, aset yang lebih aman, dan peluang yang lebih luas bagi generasi berikutnya. Ketika jawaban terhadap pertanyaan itu positif, pertumbuhan tidak hanya terjadi dalam statistik. Pertumbuhan hadir dalam kehidupan rakyat. Pada titik itulah ekonomi rakyat menjadi bukan sekadar bagian dari pemulihan, melainkan inti dari pembangunan Indonesia yang inklusif, tangguh, dan bermartabat.

21. Pendalaman Analitis: Mengapa Ekonomi Rakyat Menciptakan Efek Pengganda yang Luas

Secara makroekonomi, penguatan ekonomi rakyat dapat menghasilkan efek pengganda melalui beberapa jalur. Pertama, kelompok berpendapatan rendah dan menengah memiliki kecenderungan mengonsumsi yang relatif tinggi. Tambahan pendapatan pada kelompok ini lebih cepat kembali menjadi permintaan barang dan jasa dibanding tambahan pendapatan yang sebagian besar disimpan dalam aset finansial. Karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen penting perekonomian

Indonesia, pemulihan pendapatan rakyat dapat memperkuat permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada dorongan eksternal.

Kedua, ekonomi rakyat memiliki local multiplier. Pendapatan dari warung, bengkel, petani, nelayan, pekerja jasa, dan usaha rumahan sering dibelanjakan kembali di wilayah yang sama. Perputaran lokal tersebut mendukung usaha lain dan memperluas basis pajak daerah secara tidak langsung. Jika barang input sebagian dapat diproduksi lokal, kebocoran ekonomi keluar wilayah menurun. Karena itu, strategi substitusi input lokal yang efisien dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah tanpa jatuh pada proteksionisme.

Ketiga, ekonomi rakyat memperkuat diversifikasi sumber pendapatan. Rumah tangga yang memiliki lebih dari satu sumber pendapatan - misalnya pertanian, usaha kecil, dan pekerjaan jasa - sering lebih tahan terhadap guncangan sektoral. Diversifikasi memang dapat menurunkan spesialisasi, tetapi pada tahap tertentu ia berfungsi sebagai strategi manajemen risiko. Kebijakan dapat membantu rumah tangga bergerak dari diversifikasi defensif menuju diversifikasi produktif, yaitu memiliki beberapa aktivitas yang saling menguatkan.

Keempat, penyebaran kepemilikan usaha memperluas akumulasi aset. Pertumbuhan ekonomi yang hanya menciptakan upah tanpa kesempatan membangun aset dapat membatasi mobilitas jangka panjang. Usaha produktif, kepemilikan alat, tabungan, rumah, tanah yang legal, atau saham koperasi dapat menjadi basis keamanan ekonomi. Aset memberikan collateral, pendapatan, dan daya tahan. Karena itu, strategi ekonomi rakyat perlu menghubungkan pendapatan dengan asset building.

Kelima, ekonomi rakyat dapat berperan sebagai ruang pembentukan entrepreneurship capability. Banyak wirausaha besar memulai dari skala kecil. Ekosistem yang mempermudah percobaan usaha, kegagalan yang tidak menghancurkan, pembelajaran, dan ekspansi akan meningkatkan dinamika ekonomi. Kebijakan tidak harus menentukan pemenang, tetapi dapat mengurangi hambatan masuk dan menyediakan infrastruktur umum. Di sinilah kemudahan berusaha pada skala mikro menjadi penting.

22. Risiko Kebijakan dan Hal-Hal yang Harus Dihindari

Strategi ekonomi rakyat juga memiliki risiko jika dijalankan secara tidak disiplin. Risiko pertama adalah populisme ekonomi, yaitu kebijakan yang terlihat pro-rakyat dalam jangka pendek tetapi melemahkan kapasitas produktif. Kredit murah tanpa asesmen, subsidi permanen, proteksi tanpa peningkatan mutu, atau pembatasan harga yang merusak insentif produksi dapat menciptakan ketergantungan dan distorsi. Keberpihakan yang sehat harus memperbesar kemampuan pelaku untuk bersaing, bukan melindunginya dari semua tekanan pasar.

Risiko kedua adalah fragmentasi program. Banyak pelatihan dengan kurikulum serupa, banyak bantuan kecil, dan banyak aplikasi digital yang tidak saling terhubung dapat membebani pelaku. Pemerintah perlu mengurangi program yang tumpang tindih dan mengalihkan sumber daya ke layanan yang terbukti efektif. Simplifikasi sering lebih bernilai daripada penambahan skema baru.

Risiko ketiga adalah elite capture. Program yang disalurkan melalui komunitas atau koperasi dapat dikuasai segelintir pihak jika transparansi lemah. Mekanisme partisipasi, audit, publikasi penerima, dan kanal pengaduan harus tersedia. Pemberdayaan tidak berarti mengurangi akuntabilitas; justru akuntabilitas penting untuk menjaga legitimasi.

Risiko keempat adalah digital exclusion. Ketika semua layanan beralih daring, kelompok tanpa perangkat, konektivitas, atau literasi dapat tersisih. Model hybrid diperlukan: digital untuk efisiensi, pendampingan manusia untuk aksesibilitas. Desain layanan harus memperhatikan lansia, penyandang disabilitas, dan wilayah dengan koneksi terbatas.

Risiko kelima adalah salah ukur. Jika indikator hanya jumlah akun, jumlah kredit, atau jumlah peserta, kebijakan dapat mengejar angka tanpa hasil. Setiap program harus memiliki theory of change dan indikator outcome. Keberanian menghentikan program yang tidak efektif merupakan bagian dari tata kelola yang baik.

23. Permintaan Domestik, Daya Beli, dan Sirkulasi Pendapatan

Strategi pemulihan berbasis ekonomi rakyat mempunyai hubungan langsung dengan kekuatan permintaan domestik. Ketika pendapatan rumah tangga pulih, konsumsi tidak hanya mendorong penjualan ritel, tetapi juga mengalir ke jasa transportasi, makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan, rekreasi, dan berbagai usaha lokal. Dalam perekonomian yang pasar domestiknya besar, daya beli masyarakat merupakan jangkar stabilitas. Karena itu, mempertahankan daya beli tidak boleh dibaca sebagai agenda konsumtif yang terpisah dari produktivitas; ia merupakan jembatan yang menjaga agar kapasitas produksi tidak kehilangan pasar selama masa pemulihan.

Namun, kualitas daya beli penting. Jika kenaikan konsumsi bergantung terutama pada utang konsumtif atau subsidi sementara, pemulihan mudah rapuh. Daya beli yang sehat seharusnya berasal dari kenaikan pendapatan kerja, laba usaha, produktivitas, dan perlindungan terhadap biaya dasar yang tidak terkendali. Kebijakan harga pangan, transportasi, energi, perumahan, kesehatan, dan pendidikan mempunyai dampak besar terhadap pendapatan riil. Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, penurunan kecil pada biaya kebutuhan dasar dapat setara dengan kenaikan pendapatan nominal yang cukup berarti.

Dari sisi ekonomi rakyat, sirkulasi pendapatan dapat diperkuat melalui local procurement, pasar tradisional yang efisien, pusat distribusi daerah, dan jejaring produsen lokal. Pemerintah daerah dapat memetakan komoditas yang selama ini diimpor dari luar wilayah padahal berpotensi diproduksi lokal secara kompetitif. Pendekatan ini tidak berarti menutup perdagangan antarwilayah. Tujuannya adalah menemukan kebocoran ekonomi yang dapat dikurangi melalui peningkatan kapasitas produksi setempat. Jika sebuah daerah membelanjakan sebagian besar permintaan pangan olahan, seragam, furnitur, atau jasa dasar ke luar daerah, terdapat peluang bagi program pengembangan pemasok lokal.

Pasar tradisional juga merupakan infrastruktur ekonomi, bukan hanya ruang fisik. Perbaikan sanitasi, parkir, akses transportasi, digital payment, informasi harga, cold storage, dan manajemen sampah dapat meningkatkan efisiensi pedagang dan kenyamanan konsumen. Revitalisasi pasar yang

hanya memperbaiki bangunan tanpa memperbaiki tata kelola sering gagal meningkatkan omzet. Sebaliknya, pasar yang dikelola sebagai ekosistem dapat menghubungkan produsen desa, pedagang kota, koperasi, logistik, dan konsumen secara lebih efisien.

Pemulihan daya beli perlu pula memperhatikan kelas menengah rentan. Kelompok ini mungkin tidak tergolong miskin, tetapi memiliki sedikit buffer terhadap kehilangan pekerjaan, penyakit, atau kenaikan biaya hidup. Jika kelas menengah turun kelas, dampaknya besar terhadap konsumsi dan stabilitas sosial. Karena itu, kebijakan pekerjaan, perumahan terjangkau, pendidikan, kesehatan, serta asuransi sosial mempunyai fungsi makroekonomi. Ekonomi rakyat menjadi lebih kuat ketika basis konsumennya juga lebih aman secara finansial.

24. Pendidikan, Keterampilan, dan Produktivitas Jangka Panjang

Pendidikan adalah komponen pemulihan ekonomi yang sering memberikan hasil lebih lambat, tetapi justru menentukan kemampuan ekonomi rakyat naik kelas. Banyak masalah usaha kecil sebenarnya merupakan masalah kompetensi: pemilik tidak mampu memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, menentukan harga berdasarkan biaya, membaca laporan sederhana, menjaga konsistensi mutu, atau menilai risiko investasi. Pelatihan bisnis dasar yang tepat sasaran dapat menghasilkan dampak besar jika dikaitkan dengan praktik nyata dan pendampingan.

Sistem pelatihan vokasi perlu lebih dekat dengan rantai nilai lokal. Kurikulum yang seragam secara nasional sering kurang responsif terhadap kebutuhan daerah. Kabupaten dengan industri pengolahan ikan memerlukan kompetensi yang berbeda dari kawasan furnitur, pariwisata, atau ekonomi digital. Kemitraan sekolah vokasi, politeknik, asosiasi usaha, dan pemerintah daerah dapat mengembangkan micro-credentials yang singkat, modular, dan relevan. Pekerja tidak selalu memerlukan program panjang; mereka membutuhkan kompetensi spesifik yang langsung meningkatkan nilai kerja.

Reskilling dan upskilling juga penting bagi pekerja dewasa. Transformasi teknologi dapat mengubah tugas tanpa menghilangkan seluruh pekerjaan. Operator produksi mungkin perlu belajar menggunakan mesin digital; pedagang perlu memahami inventory system; petani perlu membaca informasi cuaca dan harga; pekerja jasa perlu menggunakan aplikasi. Kebijakan yang hanya fokus pada generasi muda akan meninggalkan pekerja yang sudah berada di pasar kerja. Lifelong learning harus menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi.

Perguruan tinggi dapat membangun model extension service untuk ekonomi rakyat, mirip penyuluhan tetapi lebih multidisipliner. Tim mahasiswa dan dosen dari manajemen, teknologi informasi, desain, pangan, teknik, dan hukum dapat membantu klaster usaha memecahkan persoalan konkret. Kegiatan ini lebih bermanfaat jika bersifat berkelanjutan dan memiliki target outcome, bukan sekadar kunjungan singkat. Bagi mahasiswa, interaksi dengan ekonomi rakyat memberi pemahaman tentang kompleksitas manajemen di lingkungan nyata.

Pada akhirnya, produktivitas adalah hasil akumulasi pengetahuan. Mesin dapat dibeli, tetapi kemampuan menggunakannya secara efektif membutuhkan learning organization. Karena itu, strategi pemulihan harus menciptakan budaya belajar di tingkat usaha: pencatatan kesalahan, evaluasi

pelanggan, pengukuran mutu, dan perbaikan proses. Ketika usaha kecil mengembangkan rutinitas belajar, mereka lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi.

25. Kesehatan, Gizi, dan Ekonomi Perawatan sebagai Infrastruktur Produktivitas

Kesehatan mempunyai hubungan langsung dengan produktivitas ekonomi rakyat. Pekerja yang sering sakit kehilangan hari kerja; pemilik usaha yang menghadapi biaya pengobatan besar dapat menggunakan modal kerja untuk kebutuhan medis; anak dengan gizi buruk memiliki risiko kehilangan potensi belajar jangka panjang. Oleh sebab itu, layanan kesehatan universal bukan hanya kebijakan sosial, tetapi investasi produktivitas. Perlindungan kesehatan yang baik mengurangi kemungkinan rumah tangga menjual aset atau berutang mahal ketika sakit.

Program gizi juga berpengaruh pada kualitas modal manusia. Dalam jangka pendek, akses pangan bergizi mendukung kemampuan belajar dan bekerja. Dalam jangka panjang, perbaikan gizi anak meningkatkan kemampuan kognitif dan produktivitas generasi berikutnya. Hubungan ini menunjukkan bahwa strategi ekonomi rakyat harus memiliki horizon lebih panjang dari siklus usaha tahunan. Pemulihan yang menanam investasi pada kesehatan dan gizi menciptakan kapasitas ekonomi masa depan.

Ekonomi perawatan atau care economy juga harus diperhitungkan. Banyak perempuan membatasi jam kerja atau usaha karena tanggung jawab merawat anak, lansia, atau anggota keluarga sakit. Investasi pada daycare, layanan lansia, dan fasilitas komunitas dapat meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan sekaligus menciptakan pekerjaan baru. Sektor perawatan sendiri dapat menjadi bagian dari ekonomi rakyat bila dikembangkan dengan standardisasi, pelatihan, dan perlindungan pekerja.

Kesehatan kerja di sektor informal sering diabaikan. Pedagang, pengemudi, pekerja konstruksi kecil, pengolah makanan, nelayan, dan pekerja rumahan menghadapi risiko ergonomi, kecelakaan, bahan kimia, atau kelelahan. Program keselamatan kerja yang sederhana dan murah dapat mengurangi biaya tersembunyi. Koperasi dan asosiasi dapat menjadi saluran untuk penyuluhan, pembelian alat pelindung, dan akses asuransi.

Integrasi kesehatan dengan ekonomi rakyat juga dapat dilakukan melalui data dan layanan. Ketika pekerja informal mendaftar usaha atau bergabung dalam program pembiayaan, mereka dapat ditawarkan informasi jaminan sosial secara otomatis. Pendekatan nudge seperti ini lebih efektif daripada mengharap individu mencari banyak layanan secara terpisah. Keterhubungan sistem mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan perlindungan.

26. Infrastruktur Fisik dan Logistik: Menurunkan Biaya Ekonomi Rakyat

Produktivitas usaha kecil tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam usaha. Jalan rusak, listrik tidak stabil, internet lambat, pelabuhan mahal, dan waktu pengiriman panjang dapat menghapus keuntungan dari efisiensi internal. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu dievaluasi dari dampaknya terhadap biaya ekonomi rakyat. Jalan yang menghubungkan sentra

produksi dengan pasar mungkin lebih produktif bagi komunitas daripada proyek prestisius yang keterkaitannya lemah dengan aktivitas lokal.

Logistik sangat penting bagi negara kepulauan. Perbedaan biaya angkut memengaruhi daya saing daerah. Pelaku kecil sering membayar biaya per unit lebih tinggi karena volume rendah. Konsolidasi kargo melalui koperasi, pusat logistik, atau platform dapat mengurangi biaya. Pemerintah juga dapat memfasilitasi jadwal pengiriman, informasi tarif, dan standardisasi kemasan agar usaha kecil lebih mudah memanfaatkan jaringan logistik modern.

Cold chain merupakan contoh infrastruktur yang dapat mengubah struktur nilai tambah. Ikan, sayur, buah, susu, dan produk segar kehilangan nilai bila rantai dingin tidak tersedia. Kerugian pascapanen sebenarnya adalah produktivitas yang hilang. Investasi cold storage bersama, kendaraan berpendingin, dan manajemen inventori dapat meningkatkan pendapatan produsen tanpa harus meningkatkan produksi primer secara besar-besaran.

Energi juga menentukan. Usaha pengolahan membutuhkan listrik yang stabil; pelaku digital membutuhkan konektivitas; petani membutuhkan pompa dan alat. Energi terbarukan terdesentralisasi dapat membuka peluang di wilayah yang belum memiliki layanan memadai. Model koperasi energi atau pembiayaan bersama dapat mengurangi beban investasi awal. Transisi energi dengan demikian dapat sekaligus menjadi strategi pemerataan infrastruktur.

Perencanaan infrastruktur seharusnya melibatkan pelaku ekonomi lokal. Mereka mengetahui titik kemacetan yang tidak selalu terlihat dalam data nasional: jembatan kecil yang memutus akses, pasar yang kekurangan ruang bongkar muat, atau sinyal yang hilang di sentra produksi. Partisipasi membuat investasi lebih responsif. Infrastruktur terbaik bukan selalu yang paling besar, melainkan yang paling efektif menurunkan biaya transaksi dan memperluas pasar.

27. Kebijakan Industri Inklusif dan Naik Kelasnya Usaha Kecil

Ekonomi rakyat memerlukan kebijakan industri, bukan hanya kebijakan UMKM. Kebijakan industri menentukan struktur sektor yang tumbuh, teknologi yang diadopsi, keterkaitan pemasok, dan posisi negara dalam rantai nilai. Jika industrialisasi hanya bertumpu pada enclave besar yang sedikit menggunakan input lokal, dampaknya terhadap ekonomi rakyat terbatas. Sebaliknya, industri yang membangun jaringan pemasok domestik dapat menciptakan jalur naik kelas bagi ribuan usaha kecil.

Supplier development harus menjadi bagian dari strategi. Perusahaan anchor mengidentifikasi calon pemasok lokal, kemudian bersama pemerintah dan lembaga pendidikan membantu peningkatan mutu, sertifikasi, delivery reliability, dan manajemen. Dukungan sebaiknya bersyarat pada target yang jelas. Setelah beberapa tahun, pemasok diharapkan mampu melayani lebih dari satu pembeli sehingga tidak tergantung pada satu hubungan.

Standardisasi sering menjadi hambatan sekaligus peluang. Sertifikasi pangan, halal, mutu, lingkungan, atau keselamatan membuka pasar tetapi membutuhkan biaya dan pengetahuan. Pemerintah dapat menyediakan shared certification services untuk klaster. Biaya tetap dibagi sehingga usaha mikro dapat mengakses standar yang sebelumnya terlalu mahal. Standardisasi kemudian menjadi tangga menuju pasar, bukan tembok penghalang.

Kebijakan industri juga harus menghindari jebakan permanent smallness. Usaha yang tumbuh kadang menghadapi kenaikan pajak, regulasi, dan kewajiban secara tiba-tiba sehingga muncul insentif untuk tetap kecil atau memecah usaha. Regulasi bertahap dapat mengurangi cliff effect. Ketika usaha naik kelas, kewajiban meningkat secara gradual dan sejalan dengan manfaat yang diterima.

Dari perspektif pembangunan, keberhasilan ekonomi rakyat bukan berarti semua usaha harus menjadi perusahaan besar. Ekosistem sehat memang membutuhkan distribusi ukuran usaha. Sebagian mikro akan tetap mikro tetapi produktif; sebagian kecil akan tumbuh menjadi perusahaan menengah dan besar. Yang penting adalah mobilitas terbuka dan hambatan struktural tidak mengunci pelaku pada produktivitas rendah.

28. Mengukur Keberhasilan: Dari PDB menuju Dashboard Kesejahteraan Produktif

PDB tetap indikator penting, tetapi tidak cukup untuk menilai ekonomi rakyat. Dashboard pemulihan perlu menggabungkan indikator pertumbuhan dengan distribusi dan ketahanan. Pertama, indikator pekerjaan: tingkat partisipasi, pengangguran, jam kerja, formalitas, upah riil, dan coverage jaminan sosial. Kedua, indikator usaha: survival rate, produktivitas per pekerja, margin, akses kredit sehat, dan penetrasi pasar. Ketiga, indikator rumah tangga: kemiskinan, kerentanan, aset, tabungan darurat, dan biaya layanan dasar.

Indikator mobilitas juga penting. Pemulihan yang baik harus memungkinkan orang bergerak dari pekerjaan berproduktivitas rendah ke pekerjaan lebih baik, dari usaha subsisten ke usaha stabil, dan dari penerima bantuan ke rumah tangga mandiri. Data panel yang mengikuti rumah tangga atau usaha dari waktu ke waktu lebih informatif daripada snapshot. Dengan data longitudinal, pemerintah dapat melihat apakah perbaikan bersifat permanen atau sementara.

Kesenjangan antarwilayah harus masuk dashboard. Rata-rata nasional dapat meningkat sementara beberapa daerah tertinggal. Indikator seperti produktivitas regional, akses internet, biaya logistik, kemiskinan perdesaan, dan kualitas layanan publik membantu mengidentifikasi divergence. Kebijakan dapat diarahkan untuk convergence tanpa memaksakan model pembangunan yang identik.

Aspek kualitas kelembagaan juga dapat diukur: waktu perizinan, keterlambatan pembayaran pengadaan, kepuasan pelaku terhadap layanan, transparansi penerima program, dan tingkat penyelesaian pengaduan. Bagi usaha mikro, kualitas birokrasi adalah bagian dari biaya bisnis. Perbaikan tata kelola dapat meningkatkan produktivitas tanpa membutuhkan subsidi tambahan.

Dashboard hendaknya sederhana tetapi konsisten. Terlalu banyak indikator membuat fokus hilang. Pemerintah dapat menetapkan sejumlah indikator inti nasional dan memberi ruang bagi daerah menambah indikator sesuai konteks. Publikasi terbuka meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan akademisi melakukan evaluasi independen. Pada akhirnya, apa yang diukur akan memengaruhi apa yang dikelola.

29. Perspektif Manajemen Strategis: Ekonomi Rakyat sebagai Portofolio Kapabilitas Nasional

Dari sudut manajemen strategis, ekonomi rakyat dapat dipandang sebagai portofolio kapabilitas nasional. Jutaan pelaku menyimpan pengetahuan pasar lokal, keterampilan produksi, jaringan sosial, adaptasi, dan entrepreneurship. Namun kapabilitas tersebut tersebar dan tidak selalu terhubung. Peran strategi publik adalah mengubah sumber daya tersebar menjadi kemampuan kolektif melalui institusi, infrastruktur, standar, dan jaringan.

Konsep dynamic capabilities relevan. Lingkungan berubah karena teknologi, iklim, geopolitik, dan preferensi konsumen. Usaha yang bertahan adalah usaha yang mampu sensing, seizing, dan transforming: membaca perubahan, menangkap peluang, dan menyesuaikan organisasi. Kebijakan sebaiknya membantu ekonomi rakyat mengembangkan tiga kemampuan tersebut. Informasi pasar membantu sensing; pembiayaan dan pelatihan membantu seizing; teknologi dan reorganisasi membantu transforming.

Ketahanan juga membutuhkan redundansi yang cerdas. Efisiensi ekstrem dapat membuat rantai pasok rapuh. Jaringan produsen lokal, pemasok alternatif, stok strategis, dan diversifikasi pasar menciptakan resilience. Ekonomi rakyat yang tersebar secara geografis dapat menjadi sumber redundansi nasional bila kualitas dan koordinasinya baik. Ini terlihat ketika gangguan besar membuat pasokan lokal menjadi sangat penting.

Manajemen strategis juga menuntut prioritas. Tidak semua sektor dan wilayah dapat menerima intensitas dukungan yang sama pada waktu bersamaan. Pemerintah harus memilih bottleneck dengan dampak sistemik, menggunakan data, dan melakukan sequencing. Infrastruktur dasar mungkin harus didahulukan sebelum digitalisasi; standardisasi sebelum ekspor; perlindungan sosial sebelum mendorong risiko usaha pada kelompok sangat rentan. Urutan intervensi memengaruhi hasil.

Dengan perspektif ini, ekonomi rakyat bukan objek belas kasihan. Ia adalah aset strategis yang perlu dikembangkan. Negara yang memiliki basis usaha lokal produktif, pekerja adaptif, sistem perlindungan kuat, dan pasar domestik tangguh akan lebih mampu menghadapi ketidakpastian global. Keunggulan nasional tidak hanya dibangun oleh beberapa perusahaan besar, tetapi oleh kepadatan kapabilitas di seluruh lapisan ekonomi.

30. Implikasi bagi Kebijakan Publik dan Pendidikan Manajemen

Kajian ekonomi rakyat mempunyai implikasi penting bagi pendidikan manajemen. Banyak teori manajemen dikembangkan dari konteks perusahaan formal dengan struktur organisasi jelas, akses modal, data, dan sistem. Padahal sebagian besar pelaku usaha di Indonesia bekerja dalam kondisi berbeda: sumber daya terbatas, batas rumah tangga-usaha kabur, keputusan berbasis relasi, dan ketidakpastian tinggi. Pendidikan manajemen perlu memperluas kasus dan metode agar relevan dengan konteks tersebut.

Mahasiswa manajemen dapat belajar bahwa strategi tidak selalu tentang ekspansi cepat. Bagi usaha mikro, strategi mungkin berarti stabilisasi arus kas, pengurangan risiko, diversifikasi pelanggan,

atau pembentukan koperasi. Manajemen sumber daya manusia pada usaha kecil lebih banyak bergantung pada trust dan multi-skilling. Manajemen pemasaran mungkin menggunakan komunitas dan social commerce. Manajemen operasi berfokus pada pengurangan waste sederhana. Konsep universal perlu diterjemahkan ke skala dan institusi yang sesuai.

Bagi kebijakan publik, pendekatan manajemen mendorong perhatian pada implementasi. Kebijakan yang baik di atas kertas dapat gagal jika user journey rumit. Pelaku ekonomi rakyat memiliki waktu dan kapasitas administrasi terbatas. Desain layanan harus mengurangi formulir, kunjungan, dan ketidakpastian. Digitalisasi pemerintah seharusnya menyederhanakan proses, bukan memindahkan birokrasi kertas menjadi birokrasi layar.

Kolaborasi lintas sektor membutuhkan governance yang jelas. Pemerintah menentukan aturan dan menyediakan barang publik; swasta membuka teknologi dan pasar; perguruan tinggi menyediakan pengetahuan; komunitas membangun kepercayaan; lembaga keuangan menyediakan modal. Setiap aktor harus memiliki peran, insentif, dan akuntabilitas. Model public-private-community-academic partnership dapat digunakan untuk kluster ekonomi lokal.

Akhirnya, ekonomi rakyat mengajarkan bahwa manajemen pembangunan adalah manajemen perubahan. Perubahan perilaku, keterampilan, institusi, dan teknologi membutuhkan waktu. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada desain program, tetapi juga pada komunikasi, kepercayaan, partisipasi, dan pembelajaran. Pemulihan nasional yang berkelanjutan memerlukan kemampuan mengelola perubahan pada skala masyarakat.

31. Reformasi Regulasi dan Kemudahan Berusaha yang Substantif

Kemudahan berusaha bagi ekonomi rakyat tidak boleh dinilai hanya dari keberadaan portal perizinan atau jumlah regulasi yang disederhanakan. Pelaku mikro merasakan regulasi melalui pengalaman konkret: berapa lama izin selesai, apakah persyaratan dipahami, berapa biaya kepatuhan, apakah ada kepastian ketika aturan berubah, dan apakah manfaat formalitas nyata. Reformasi regulasi yang substantif harus dimulai dari perspektif pengguna. Pemerintah perlu memetakan seluruh perjalanan pelaku, dari memulai usaha, memperoleh izin, membayar pajak, mempekerjakan orang, mengakses kredit, mengikuti pengadaan, hingga menutup usaha secara legal. Setiap titik yang menimbulkan biaya tanpa nilai perlu ditinjau kembali.

Regulasi yang baik juga harus proporsional terhadap risiko. Usaha makanan yang menyangkut kesehatan publik tentu membutuhkan standar lebih ketat daripada kegiatan berisiko rendah. Namun, standar dapat dirancang bertahap sesuai skala dan profil risiko. Prinsip proportional regulation memungkinkan perlindungan publik tetap kuat tanpa membebani usaha mikro dengan kewajiban yang sama persis seperti perusahaan besar. Pendampingan compliance dapat menjadi layanan publik, terutama bagi sertifikasi pangan, keselamatan, lingkungan, dan ketenagakerjaan.

Kepastian hukum kontrak sangat penting. Banyak transaksi ekonomi rakyat berlangsung atas dasar kepercayaan dan perjanjian informal. Kepercayaan sosial berharga, tetapi ketika skala membesar dibutuhkan dokumen dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana. Model kontrak standar, layanan mediasi murah, dan edukasi hukum dapat membantu pelaku kecil

bertransaksi dengan perusahaan yang lebih besar tanpa kehilangan perlindungan. Hukum kemudian menjadi aset produktif, bukan ancaman administratif.

Reformasi juga perlu mengurangi biaya keluar dari kegagalan. Wirausaha akan lebih berani berinovasi jika kegagalan usaha yang jujur tidak menghancurkan kehidupan pribadi selamanya. Mekanisme restrukturisasi utang, konsultasi, dan penutupan usaha sederhana dapat menciptakan second chance. Ekonomi yang dinamis bukan ekonomi tanpa kegagalan, tetapi ekonomi yang memungkinkan sumber daya berpindah dari usaha yang tidak lagi produktif ke peluang baru.

Dengan demikian, reformasi regulasi harus dilihat sebagai bagian dari produktivitas. Setiap jam yang dihabiskan untuk prosedur yang tidak perlu adalah waktu yang tidak digunakan untuk produksi, pemasaran, atau pembelajaran. Penyederhanaan yang benar dapat menghasilkan manfaat luas tanpa belanja fiskal besar. Karena itu, regulatory quality merupakan instrumen penting dalam strategi pemulihan ekonomi rakyat.

32. Ketahanan terhadap Krisis Masa Depan

Pemulihan ekonomi seharusnya tidak mengembalikan masyarakat pada kerentanan sebelum krisis. Tujuan yang lebih ambisius adalah membangun shock absorbers di tingkat rumah tangga, usaha, komunitas, dan negara. Rumah tangga membutuhkan tabungan darurat dan perlindungan sosial; usaha membutuhkan cadangan kas, asuransi, pemasok alternatif, dan data; komunitas membutuhkan kelembagaan; pemerintah membutuhkan ruang fiskal serta sistem respons cepat. Ketahanan adalah kemampuan menyerap guncangan, beradaptasi, dan tetap mempertahankan fungsi utama.

Bagi usaha mikro, konsep business continuity dapat disederhanakan. Pelaku perlu mengetahui aktivitas kritis, kontak pemasok alternatif, cara melindungi data, dan prioritas pengeluaran ketika penjualan turun. Pelatihan kebencanaan ekonomi sering dianggap hanya relevan untuk perusahaan besar, padahal usaha kecil justru lebih rentan. Modul sederhana dapat dikembangkan melalui koperasi, bank, asosiasi, dan pemerintah daerah.

Risiko iklim membutuhkan perhatian khusus. Banjir dapat menghentikan pasar dan merusak stok; kekeringan memengaruhi pertanian; panas ekstrem menurunkan produktivitas; perubahan musim memengaruhi pariwisata dan pangan. Peta risiko iklim perlu dihubungkan dengan peta ekonomi rakyat agar program adaptasi tidak bersifat umum. Infrastruktur drainase, asuransi, diversifikasi, varietas tahan iklim, dan sistem peringatan dini mempunyai dimensi ekonomi langsung.

Risiko digital juga bertambah. Penipuan, pencurian akun, ransomware, dan kebocoran data dapat merusak usaha kecil. Literasi keamanan siber harus menjadi bagian dari digitalisasi. Praktik dasar seperti autentikasi berlapis, backup, verifikasi pembayaran, dan pemisahan akun pribadi-usaha dapat mencegah kerugian. Platform dan lembaga keuangan juga memiliki tanggung jawab menyediakan sistem yang aman dan mekanisme respons cepat.

Ketahanan nasional pada akhirnya dibangun dari jutaan unit yang lebih tangguh. Bila rumah tangga dan usaha memiliki buffer, setiap guncangan tidak langsung berubah menjadi krisis sosial besar. Investasi resilience mungkin tampak tidak menghasilkan pertumbuhan segera, tetapi

mengurangi kerugian di masa depan. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, pengurangan volatilitas kesejahteraan sama pentingnya dengan peningkatan rata-rata pendapatan.

33. Sintesis: Ekonomi Rakyat sebagai Fondasi Kontrak Sosial Pembangunan

Pada tingkat paling mendasar, ekonomi rakyat berkaitan dengan kontrak sosial pembangunan: keyakinan bahwa kerja, usaha, dan partisipasi masyarakat memiliki jalan yang masuk akal menuju kehidupan yang lebih baik. Ketika seseorang bekerja keras tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, ketika usaha kecil produktif tidak memperoleh akses pasar karena struktur yang tertutup, atau ketika guncangan kesehatan dapat menghapus seluruh aset keluarga, kepercayaan terhadap sistem ekonomi melemah. Pemulihan ekonomi harus memulihkan kepercayaan tersebut melalui peluang yang nyata dan aturan yang adil.

Kontrak sosial tidak berarti semua hasil harus sama. Perbedaan pendapatan dapat muncul dari keterampilan, inovasi, risiko, dan usaha. Namun, kesempatan dasar perlu cukup luas, mobilitas harus mungkin, dan kegagalan tidak boleh otomatis membawa seseorang ke kemiskinan permanen. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hukum, persaingan sehat, dan perlindungan sosial menyediakan lantai institusional agar pasar dapat bekerja lebih adil.

Ekonomi rakyat juga memperkuat demokrasi ekonomi karena distribusi kapasitas produksi lebih luas. Masyarakat yang memiliki usaha, keterampilan, dan aset produktif memiliki daya tawar lebih besar dan ketergantungan lebih kecil. Hal ini tidak berarti menolak investasi besar. Justru investasi besar akan memberi dampak sosial lebih kuat jika terhubung dengan pemasok lokal, pekerja terampil, dan komunitas yang memiliki kapasitas negosiasi.

Pemulihan nasional karena itu dapat dipahami sebagai proses membangun kembali tiga bentuk modal: modal ekonomi berupa aset dan produktivitas, modal manusia berupa kesehatan dan keterampilan, serta modal sosial berupa kepercayaan dan kelembagaan. Ketiganya saling memperkuat. Kredit akan lebih efektif bila keterampilan ada; teknologi akan lebih efektif bila organisasi mampu belajar; koperasi akan lebih efektif bila tata kelola dipercaya; perlindungan sosial akan lebih efektif bila terhubung dengan layanan produktif.

Jika kebijakan mampu menyatukan dimensi-dimensi tersebut, ekonomi rakyat bukan lagi diperlakukan sebagai sektor yang selalu membutuhkan pertolongan. Ia menjadi sumber inovasi, pekerjaan, stabilitas permintaan, ketahanan pangan, integrasi wilayah, dan kohesi sosial. Itulah alasan mengapa strategi pemulihan ekonomi nasional perlu menjadikan ekonomi rakyat sebagai fondasi, bukan lampiran. Pertumbuhan yang berakar luas akan lebih tahan lama karena ditopang oleh jutaan keputusan produktif masyarakat, bukan hanya beberapa pusat kegiatan ekonomi.

34. Rekomendasi Kebijakan Prioritas

Berdasarkan keseluruhan analisis, prioritas pertama adalah mengubah orientasi kebijakan dari bantuan berbasis program menuju penguatan kapasitas berbasis perjalanan pelaku. Setiap usaha mikro dan rumah tangga produktif seharusnya memiliki jalur layanan yang jelas: registrasi sederhana, asesmen kebutuhan, pelatihan yang relevan, pembiayaan sesuai kapasitas, akses pasar,

perlindungan sosial, dan peluang naik kelas. Sistem seperti ini membutuhkan koordinasi lintas lembaga, tetapi justru dapat mengurangi pemborosan akibat program yang terfragmentasi. Prinsip utamanya adalah satu pelaku, satu profil kebutuhan, banyak layanan yang terhubung.

Prioritas kedua adalah menempatkan produktivitas sebagai indikator pusat. Kebijakan UMKM sebaiknya tidak lagi terutama dinilai dari jumlah unit usaha, jumlah kredit, atau jumlah peserta pelatihan. Pemerintah perlu mengukur output per pekerja, margin, kualitas, waktu proses, tingkat cacat, dan survival rate. Dengan indikator produktivitas, program menjadi lebih mudah dievaluasi. Pelatihan yang tidak meningkatkan kinerja dapat dihentikan; teknologi yang terbukti menurunkan biaya dapat diperluas; klaster yang menghasilkan nilai tambah dapat menjadi model bagi daerah lain.

Prioritas ketiga adalah memperkuat permintaan melalui pengadaan dan kemitraan. Banyak pelaku kecil sebenarnya mampu memproduksi tetapi tidak memiliki kepastian pasar. Pemerintah pusat, daerah, BUMN, rumah sakit, sekolah, universitas, dan perusahaan besar dapat menjadi anchor demand bagi produk yang memenuhi standar. Pengadaan harus transparan dan kompetitif, namun desain lot, persyaratan, dan pembayaran perlu memungkinkan partisipasi usaha kecil. Ketika pasar terbuka, pembiayaan menjadi lebih mudah karena arus pendapatan lebih dapat diprediksi.

Prioritas keempat adalah membangun perlindungan sosial portabel bagi pekerja ekonomi rakyat. Pekerja masa kini dapat berpindah antara formal, informal, gig, usaha mandiri, dan pekerjaan keluarga. Perlindungan yang melekat pada satu pemberi kerja menjadi kurang memadai. Sistem yang mengikuti individu, dengan kontribusi fleksibel dan subsidi terarah bagi kelompok rentan, akan meningkatkan keamanan tanpa menghambat mobilitas. Jaminan kesehatan, kecelakaan, hari tua, dan kehilangan pendapatan perlu semakin mudah diakses.

Prioritas kelima adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan lembaga perantara. Pemerintah pusat tidak mungkin memahami semua detail ekonomi lokal. Diperlukan koperasi, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, bank daerah, dan organisasi komunitas yang mampu menerjemahkan kebijakan ke kebutuhan nyata. Investasi pada kapasitas pendamping sama pentingnya dengan investasi pada penerima. Pendamping profesional yang memahami manajemen, teknologi, pembiayaan, dan konteks sosial dapat meningkatkan kualitas implementasi.

Prioritas keenam adalah memastikan transformasi digital berlangsung aman dan produktif. Digitalisasi bukan tujuan tersendiri. Setiap adopsi teknologi perlu menjawab persoalan ekonomi: apakah menurunkan biaya, mempercepat pembayaran, meningkatkan penjualan, mengurangi stok, memperbaiki mutu, atau memperluas informasi. Program digital harus memasukkan keamanan siber, perlindungan data, dan kemampuan analitik sederhana. AI dapat menjadi alat baru, tetapi penggunaannya perlu diarahkan untuk memperkuat keputusan manusia dan kemampuan usaha, bukan menciptakan ketergantungan baru.

Prioritas ketujuh adalah menginstitutionalisasi evaluasi dan pembelajaran kebijakan. Indonesia memerlukan mekanisme yang memungkinkan pilot diuji, hasil dipublikasikan, dan program diperbaiki secara cepat. Evaluasi tidak boleh dipahami sebagai mencari kesalahan, tetapi sebagai sistem pembelajaran. Kebijakan ekonomi rakyat bersentuhan dengan jutaan konteks yang berbeda, sehingga adaptasi merupakan keniscayaan. Pemerintah yang mampu belajar lebih cepat akan memperoleh dampak lebih besar dari sumber daya fiskal yang sama.

Glosarium

Ekonomi rakyat: Sistem kegiatan ekonomi yang kepemilikan, keputusan, manfaat, dan risikonya dekat dengan rumah tangga, komunitas, usaha mikro-kecil, koperasi, dan produsen lokal.

UMKM: Usaha mikro, kecil, dan menengah; kelompok usaha yang berbeda dalam skala aset, omzet, tenaga kerja, dan kapasitas manajerial.

Koperasi: Badan usaha berbasis keanggotaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama.

People-centered recovery: Pendekatan pemulihan yang menempatkan kesejahteraan, pekerjaan, kapabilitas, dan ketahanan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan.

Pertumbuhan inklusif: Pertumbuhan ekonomi yang memperluas kesempatan dan membagikan manfaat secara lebih merata antarkelompok dan antarwilayah.

Produktivitas: Kemampuan menghasilkan output atau nilai tambah dari sejumlah input, misalnya output per pekerja atau per jam kerja.

Pekerjaan layak: Pekerjaan yang produktif, memberi penghasilan layak, aman, menghormati hak pekerja, dan menyediakan perlindungan sosial.

Informalitas: Kondisi pekerjaan atau usaha yang berada di luar sebagian atau seluruh pengaturan formal seperti registrasi, pajak, kontrak, atau jaminan sosial.

Inklusi keuangan: Akses dan penggunaan layanan keuangan formal yang terjangkau, aman, dan sesuai kebutuhan.

Kesehatan finansial: Kemampuan rumah tangga atau usaha mengelola arus kas, tabungan, utang, risiko, dan investasi secara berkelanjutan.

Value chain: Rangkaian aktivitas dari input, produksi, pengolahan, logistik, pemasaran, hingga konsumen akhir yang bersama-sama membentuk nilai produk.

Klaster usaha: Konsentrasi geografis atau jaringan pelaku usaha dan lembaga pendukung yang berinteraksi dalam sektor atau rantai nilai tertentu.

Local multiplier: Efek berulang dari pendapatan yang dibelanjakan kembali di wilayah lokal sehingga mendukung aktivitas ekonomi tambahan.

Perlindungan sosial adaptif: Sistem perlindungan yang dapat merespons perubahan risiko dan guncangan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.

Formalitas usaha: Status usaha yang memenuhi persyaratan registrasi dan aturan tertentu serta memperoleh akses pada hak, perlindungan, dan layanan formal.

Digital capability: Kemampuan nyata menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan operasi, pemasaran, keputusan, keamanan, dan produktivitas.

Platform cooperative: Koperasi yang menggunakan platform digital dan dimiliki atau dikendalikan oleh pekerja, produsen, atau pengguna.

Just transition: Transisi menuju ekonomi hijau yang membagi biaya dan manfaat secara adil serta melindungi pekerja dan kelompok rentan.

Outcome: Perubahan nyata yang terjadi setelah program, misalnya kenaikan pendapatan atau produktivitas, berbeda dari output berupa aktivitas langsung.

Productive inclusion: Pendekatan yang menggabungkan perlindungan sosial dengan dukungan produktif agar kelompok rentan dapat meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2026a). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026b). Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026c). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026d). November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah. BPS.

Fowowe, B., & Folarin, E. O. (2019). The effects of fragility and financial inequalities on inclusive growth in African countries. *Review of Development Economics*, 23(3), 1141-1176.
<https://doi.org/10.1111/rode.12594>

International Labour Organization. (2025a). Decent Work Country Programme for Indonesia 2020-2025. ILO.

International Labour Organization. (2025b). World Employment and Social Outlook: Trends 2025. ILO.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025a). APBN 2026: Tujuan dan arah kebijakan. Media Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025b). APBN 2026 motor menuju pertumbuhan berkelanjutan. Kementerian Keuangan RI.

Prasetyo, Y. E., Surtiari, G. A. K., & Nawawi. (2023). Unlocking the interaction of social restriction and social protection in Indonesia's COVID-19 policy: Future risk and adaptation. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 20(1), 2269223.
<https://doi.org/10.1080/1943815X.2023.2269223>

Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia under the new normal: Challenges and the way ahead. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 269-299.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>

Williams, C. C. (2015). Out of the shadows: Classifying economies by the extent and nature of employment in the informal economy. *International Labour Review*, 154(3), 331-351.
<https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2015.00245.x>

World Bank. (2025). Indonesia Economic Prospects, June 2025. World Bank.

- Jomo, K. S., & Chowdhury, A. (2020). COVID-19 pandemic recession and recovery. *Development*, 63, 226-237. <https://doi.org/10.1057/s41301-020-00262-0>
- Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., & Kinnan, C. (2015). The miracle of microfinance? Evidence from a randomized evaluation. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(1), 22-53. <https://doi.org/10.1257/app.20130533>
- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
- Rodrik, D. (2008). *One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth*. Princeton University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77-90.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>